

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya Hukum Pidana di Indonesia dalam masyarakat dipergunakan sebagai sarana masyarakat untuk membasmi segala bentuk Tindak kejahatan. Oleh sebab itu, peraturan yang tertera dalam Hukum Pidana mencakup perbuatan apa saja yang dilarang maupun yang diperbolehkan bagi masyarakat yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang ditengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela.¹

Seperti yang telah diketahui, Negara Indonesia sebagai Negara Hukum dalam cita-citanya untuk mengatur, menertibkan, melindungi hak dan kewajiban warga Negeranya salah satunya adalah dengan menggunakan sistem peradilan Hukum Pidana. Peraturan Hukum Pidana harus dijamin pelaksanaannya, agar ditaati oleh masyarakat. Hukum Pidana yang mengandung norma Hukum dan sanksi Pidana, diterapkan terhadap Barang siapa melakukan perbuatan Pidana yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat.²

Menurut Andi Hamzah, tujuan Hukum Pidana yang mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhirnya sebenarnya ialah mencapai

¹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hal. 1.

² C.S.T. Kansil, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 14.

suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.³

Menurut Sudarto, fungsi umum Hukum Pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Selanjutnya, fungsi Hukum Pidana adalah melindungi kepentingan Hukum dari perbuatan yang hendak merugikan dengan menggunakan sanksi yang berupa Pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang Hukum lainnya.⁴

Hukum Pidana Indonesia bentuknya tertulis dikodifikasikan dalam sebuah Kitab Undang-Undang. Dalam perkembangannya banyak yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa Undang-Undang. Hukum Pidana yang tertulis dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari zaman pemerintah penjajahan Belanda.⁵

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan kerjasama antara penegak Hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Belum memuaskannya keadaan penegak Hukum di Negara kita ini ironisnya terbentur pada para Penegak Hukum yang seharusnya memberi contoh teladan kepada masyarakat dalam mentaati Hukum serta menegakkan Hukum secara murni dan konsekuen.⁶

³ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia Eisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 9.

⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 11-12. Dalam, Sudaryono. Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana 1*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 318.

⁵ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 174-175.

⁶ Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Tindak Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.19.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi Hukum acara Pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari Hukum acara Pidana, yaitu antara lain: pengertian penyelidikan atau penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya Hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan.⁷

Bambang Poernomo mengemukakan pengertian Hukum acara Pidana dalam tiga tingkatan. *Pertama*, peraturan Hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, dan eksekusi putusan Hakim. *Kedua*, di samping memuat peraturan Hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, eksekusi putusan Hakim, juga termasuk peraturan Hukum tentang susunan peradilan, wewenang peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan kehakiman lainnya yang kaitannya itu dengan urusan perkara Pidana. *Ketiga*, mengatur tentang alternatif jenis Pidana, ukuran memperingan atau memperberat Pidana, dan cara menyelenggarakan Pidana sejak awal sampai selesai menjalani Pidana sebagai pedoman pelaksanaan Pidana.⁸

Menurut Van Bemmelen dalam bukunya *Lerrboek van het Netherlandes Strafprocesrecht*, yang disitir Rd. Achamad S. Soema Dipradja,

⁷ Andi Sofyan, Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 3.

⁸ Ridwan Eko Prasetyo, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 2.

mengemukakan bahwa pada pokoknya Hukum acara Pidana mengatur hal-hal:⁹

1. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya Undang-Undang Pidana, oleh alat-alat Negara, yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
2. Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
3. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi, dapat ditangkap, jika perlu ditahan.
4. Alat-alat Barang yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi diserahkan kepada Hakim, demikian juga diusahakan agar Tersangka dapat dihadapkan kepada Hakim.’
5. Menyerahkan kepada Hakim untuk diambil putusan tentang terBarang tidaknya dari pada perbuatan yang disangka dilakukan oleh Tersangka dan Tindakan atau Hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan.
6. Menentukan daya upaya Hukum yang dapat digunakan terhadap putusan yang diambil Hakim.
7. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa Pidana atau Tindakan untuk dilaksanakan.

⁹ Andi Sofyan, Abd. Asis, *Op-cit*, hal. 7.

Berbicara mengenai Hukum Acara Pidana tidak terlepas dari adanya upaya pemaksaan dalam proses penyidikan yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberi penjelasan sebagai berikut:

“Penyitaan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil dan atau menyimpan di bawah penguasaannya Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pemBarangan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Menurut Darwan Prints bahwa penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu Barang-Barang baik yang merupakan milik Tersangka atau Terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu Tindak Pidana dan berguna untuk pembuktian.¹⁰

Benda-Benda yang diperbolehkan disita dalam proses penyitaan telah disebutkan di dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

1. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari Tindakan Pidana atau sebagai hasil dari Tindakan Pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan Tindak Pidana atau untuk mempersiapkannya.

¹⁰ Andi Sofyan, Abd. Asis, *Op-cit*, hal. 155.

3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan Tindak Pidana.
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan.
5. Benda yang telah dibuat khusus untuk melakukan suatu Tindak Pidana.

Menurut Nikolas Simanjutak, Benda Sitaan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. *Corpora delicti*, artinya Benda itu menjadi bagian dari kegiatan usaha atau korporasi. Misalnya, dalam bentuk tagihan hanya untuk memBarangkan ada atau tidaknya Pidana di dalamnya.
2. *Instrumenta delicti* adalah segala Benda yang berkaitan langsung sebagai alat yang dipergunakan dalam terjadinya Tindak Pidana oleh Tersangka. Benda seperti ini dapat digunakan sebagai alat bantu pelancar melakukan Tindak Pidana, menghalang-halangi dan seterusnya.

Pada dasarnya tujuan penyitaan sedikit berbeda dengan tujuan proses penggeledahan, yaitu tujuan penggeledahan adalah untuk kepentingan penyidikan, sedangkan tujuan penyitaan sendiri adalah untuk kepentingan pemBarangan terutama ditujukan sebagai Barang Barang di muka persidangan.¹²Jadi pada intinya tujuan diadakannya proses penyitaan untuk

¹¹ Ridwan Eko Prasetyo, *Op-cit*, hal. 55.

¹² Andi Sofyan, Abd. Asis, *Op-cit*, hal. 155.

dipergunakan sebagai Barang Barang dalam penyelidikan, tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan di dalam suatu Pengadilan.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 44 ayat 1 telah menjelaskan bahwasanya Benda Sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Penyimpanan Benda Sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan Benda tersebut di larang untuk digunakan oleh siapa pun juga.¹³

Berkaitan dengan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Keputusan Direktur Jendral pemasyarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 telah menjelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.¹⁴

Dalam suatu pemeriksaan perkara khususnya bidang Hukum Pidana, terkadang penyidik melakukan proses penyitaan dengan cara paksa terhadap Benda yang dimiliki oleh Tersangka dalam melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana. Tidak sedikit Barang Barang yang disita oleh penyidik terawat dengan baik bahkan Barang yang telah disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dapat hilang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹³ Andi Sofyan, Abd. Asis, *Op-cit*, hal. 159.

¹⁴ [Eprint.uny.ac.id/18199/1/3.%20BAB%20I.pdf](http://eprint.uny.ac.id/18199/1/3.%20BAB%20I.pdf), diakses pada hari Senin, 19 Maret 2018, pukul 21.39 WIB.

Penulis ingin mengetahui bagaimana Pengelolaan sebenarnya Barang - Barang suatu perbuatan Tindak Pidana yang telah dikelola oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Ir. Sutami No.7 Surakarta.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas Penulis mengangkat judul Penelitian ini yaitu dengan judul “EFEKTIFITAS RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA (RUPBASAN) DALAM PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan Penulis diatas, maka dalam Penelitian yang berjudul “ Efektifitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dalam Penyimpanan Benda Sitaan Negara”, Penulis akan menelusuri tentang :

1. Bagaimana Efektifitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta dalam Penyimpanan Benda Sitaan Negara ?
2. Bagaimana Bentuk Perawatan dan/atau Pengelolaan Benda Sitaan Negara di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta ?
3. Bagaimana kendala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta dalam Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan bagaimana cara mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah Penulis menentukan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Efektifitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta dalam Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
2. Untuk mengetahui bentuk Perawatan dan/atau Pengelolaan Benda Sitaan Negara di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta.
3. Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta dalam Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan bentuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari Penelitian Penelitian ini diharapkan tercapai:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Jaminan Perawatan Barang Sitaan Negara.
 - b. Memperbanyak refrensi dan literatur dalam dunia kepustakaan, khususnya terkait dengan jaminan Perawatan Barang Sitaan Negara.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan Jaminan Perawatan Barang Sitaan Negara.
 - b. Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti Penulis serta dapat mengembangkan pola pikir penalaran dan pengetahuan Penulis dalam menyusun suatu Penelitian Hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah:

“Serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya Benda bergerak atau Benda yang tidak dapat bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pemBarangan dalam penyeledikan, penuntutan dan peradilan.”

Pengertian mengenai Benda Sitaan telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan Benda Sitaan adalah Benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.

Menurut Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa Barang atau Benda yang dapat disita, adalah sebagai berikut:

1. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari Tindakan Pidana atau sebagai hasil dari Tindak Pidana.
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan Tindak Pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan Tindak Pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan Tindak Pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah suatu

rumah atau tempat dimana berfungsi sebagai tempat penyimpanan segala macam jenis Benda Sitaan Negara dari hasil Tindak Pidana yang memiliki tujuan sebagai Barang dalam penyelidikan, tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Dalam Ketetapan Menteri Kehakiman RI No: M.04.PR.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 29 membahas mengenai fungsi dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yaitu:

1. Melakukan pengadministrasian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.
3. Melakukan pengamanan dan Pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
4. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan Penelitian deskriptif, Penelitian deskriptif adalah dimana Penelitian ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek Hukum Penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹⁵ Alasan Penulis menggunakan jenis Penelitian

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 97.

deskriptif karena Penulis ingin mengetahui proses Perawatan Barang Sitaan Negara, apakah Perawatan Barang Sitaan Negara yang disimpan didalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara khususnya di Kota Surakarta sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat dan jelas terkait dengan masalah yang diambil dalam tugas Penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan Empiris, karena dalam hal ini Penulis ingin melakukan Penelitian terkait dengan Perawatan Barang Sitaan Negara di Kota Surakarta dengan cara wawancara dengan aparat penegak Hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan Penelitian di Kepolisian Resort (Polresta) Kota Surakarta, Kejaksaan Negeri Kota Surakarta dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta, Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan Penulis berdomisili di Kota Surakarta, sehingga dapat mempermudah Penulis dalam melakukan Penelitian dengan baik dan lancar.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan Penulis dalam Penelitian ini berupa data sekunder dan data primer, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan Hukum yang mengikat,¹⁶ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam Penelitian ini berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.16 Tahun 2014.
- 4) Wawancara dengan pihak yang dianggap mengetahui segala informasi yang diperlukan oleh Penulis dalam Penelitian ini yang berupa Pengelolaan Benda Sitaan Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan Penelitian ini, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil Penelitian yang berwujud laporan, buku harian, ataupun bahan-bahan pustaka lainnya.¹⁷ Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam Penelitian ini berupa:

- 1) Data yang mengatur mengenai Perawatan Barang Barang yang disimpan di Rumah penyimpanan Barang Sitaan Negara di Kota Surakarta.

5. Metode Analisis Data.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press, Hal 52

¹⁷ *Ibid*, Hal. 12.

Dalam melakukan analisa data Penulis menggunakan metode analisa data kualitatif, yang dimana artinya merupakan suatu tata cara Penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis, yang merupakan apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan dan juga perilakunya nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸ Sehingga menghasilkan hasil pemikiran yang benar dengan menggunakan pola pikir induktif (*premis minor to premis mayor*).

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi Penelitian, maka Penulis menyusun sistematika Penelitian ini sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan), Penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II (Tinjauan Pustaka), dalam tinjauan pustaka Penulis akan menguraikan mengenai sistem peradilan pidana, tinjauan umum mengenai pembuktian dan alat bukti, tinjauan mengenai penyitaan dan tinjauan umum mengenai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).

Bab III (Hasil Penelitian dan Pembahasan), Penulis akan menguraikan mengenai Efektifitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta, Bentuk Perawatan dan/atau Pengelolaan Benda Sitaan Negara di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kota Surakarta dan kendala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1

¹⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 192.

Kota Surakarta dalam Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut.

Bab IV (Penutup), Penulis akan menyimpulkan dari hasil penelitian dan pembahasan dan penulis akan memberikan saran.